

Label Kebahasaan sebagai Praktik *Victim Blaming* dalam Komentar Media Sosial di TikTok (*Linguistic Labeling as a Victim-Blaming Practice in Social Media Comments on TikTok*)

¹Felix Brian Hari Ekaristanto*, ²Fitri Alfariy

¹Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia

²Queen's University Belfast, United Kingdom

E-mail: ¹felix.ekaristianto@uajy.ac.id; ²falfariy01@qub.ac.uk

*Correspondent email author: felix.ekaristianto@uajy.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Received 30 June 2026

Revised 19 July 2026

Accepted 27 July 2026

Keywords

Critical Discourse Analysis;

Norman Fairclough;

Sexual Harassment;

Social Media;

Victim Blaming.

This study aims to describe the linguistic forms that embody victim blaming in social media comments regarding sexual harassment victims. It employs a qualitative descriptive method utilizing Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis approach. The data consists of netizens' comments on social media posts concerning two sexual harassment cases: the harassment of female pilgrims in the Holy Land and verbal harassment of a female passenger by a commuter train (KRL) officer. The findings reveal that victim-blaming is represented through several linguistic strategies: (1) negative labeling of the victim such as "wanita lemah", "sok cantik", "halu", or "baper"; (2) the use of deontic modality, positioning the victim as someone who ought to act in accordance with specific norms; (3) the use of epistemic modality, reflecting the speaker's conviction in defining the causes or boundaries of sexual harassment; (4) the use of presuppositions implying the victim contributed to the harassment; and (5) representations that shift responsibility from the perpetrator to the victim through discourses of risk, divine testing, retribution, or moral obligation. The study underscores that social media language serves not merely as a communication tool but as a social practice that shapes societal perceptions of victims and perpetrators in cases of sexual harassment.

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat Artikel

Masuk 30 Juni 2026

Direvisi 19 Juli 2026

Diterima 27 Juli 2026

Kata Kunci

Analisis Wacana

Kritis;

Media Sosial;

Norman Fairclough;

Pelecehan Seksual;

Victim Blaming.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk-bentuk penggunaan bahasa yang merepresentasikan *victim blaming* dalam komentar media sosial terhadap korban pelecehan seksual. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Data penelitian berupa komentar warganet pada unggahan media sosial TikTok mengenai dua kasus pelecehan seksual, yaitu kasus pelecehan terhadap jamaah perempuan di Tanah Suci dan kasus pelecehan verbal oleh petugas KRL terhadap penumpang perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *victim blaming* direpresentasikan melalui beberapa strategi kebahasaan, yaitu (1) pelabelan negatif terhadap korban, seperti "wanita lemah", "sok cantik", "halu", dan "baper"; (2) penggunaan modalitas deontik yang menempatkan korban sebagai pihak yang seharusnya bertindak sesuai norma tertentu; (3) penggunaan modalitas epistemic yang memperlihatkan keyakinan penutur dalam mendefinisikan penyebab maupun batasan pelecehan seksual; (4) penggunaan presuposisi yang menganggap korban turut berkontribusi terhadap terjadinya pelecehan; serta (5) representasi yang mengalihkan tanggung jawab dari pelaku kepada korban melalui wacana risiko, ujian, balasan, maupun kewajiban moral. Penelitian ini menegaskan bahwa bahasa dalam media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai praktik sosial yang membentuk cara masyarakat memandang korban dan pelaku dalam kasus pelecehan seksual.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Penyalahan korban atau *victim blaming* merupakan fenomena ketika korban mendapat perlakuan yang kurang baik sampai disalahkan atas kejadian yang menimpanya. Dalam hal ini, korban dirugikan lebih dari satu kali sehingga memberikan trauma berlebih pada korban. Pada praktiknya, budaya pada lingkungan sosial tertentu turut memengaruhi cara perilaku seseorang untuk menyatakan bahwa perbuatan orang lain benar atau salah. Kejadian yang sering berulang pada lingkungan sosial masyarakat merupakan manifestasi budaya mengakar pada lingkungan sosial tersebut. Tindakan penyalahan korban, khususnya pada korban pelecehan sering terjadi pada kehidupan masyarakat. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya pandangan bahwa korban pelecehanlah yang menyebabkan terjadinya pelecehan. Fenomena ini dianggap sebagai respons yang normal dan wajar sehingga memperkeruh kerentanan korban untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sepatutnya, dan sebagai implikasinya, korban mengalami reviktimisasi baik secara psikologis maupun sosial. [Alfi & Halwati \(2019\)](#) menyebut bahwa *blaming the victim* adalah tindakan untuk mencari pembenaran yang digunakan untuk menyudutkan/menyalahkan korban. Faktor terjadinya *blaming the victim* terdiri atas faktor institusional, situasi, dan individu. Tindakan tersebut dapat terjadi melalui verbal, nonverbal, dan media sosial.

Media sosial kerap kali menjadi wadah bagi pelaku penyebaran hoaks dan pelaku perundungan. [Isnaini et al. \(2025\)](#) menyatakan bahwa peningkatan literasi digital merupakan bentuk pengaturan diri dan peningkatan dalam menggunakan media digital. Kehadiran media sosial telah mengubah pola transmisi informasi satu arah yang ditunjukkan melalui media massa, seperti televisi dan media cetak ([Muttaqin & Sriyono, 2021](#)). Seperti pada kasus penelitian [Saputra & Gusnita \(2021\)](#), korban pada kasus *victim blaming* cenderung memilih diam karena dianggap tidak terlalu penting. Adapun menurut [Xanderina et al. \(2024\)](#), peran etika dalam penggunaan media sosial terkait kesadaran akan bahaya budaya patriarki dalam *victim blaming* juga perlu ditumbuhkan. Diskusi dan kampanye mengenai bagaimana budaya patriarki memperkuat *victim blaming* harus diperluas agar pola pikir yang menyalahkan korban secara bertahap dapat diubah. Dengan adanya kesadaran kolektif, menyalahkan korban, khususnya pada media sosial, diharapkan dapat berkurang sehingga pelecehan seksual dapat memperoleh keadilan dan perlindungan yang layak.

[Ubino dan Astuti \(2025\)](#) menyatakan bahwa tindakan menyalahkan korban di media sosial merupakan fenomena kompleks dan multidimensi yang mampu memperberat beban psikologis serta sosial para penyintas kekerasan seksual. Budaya patriarkis, pemberitaan media yang bias, stereotip gender, dan rendahnya empati digital memperkuat narasi yang menyalahkan pakaian, perilaku, atau latar belakang korban. Wacana semacam itu memicu rasa malu, ketakutan, depresi, dan keengganan untuk melapor. Fokus media pada pelaku serta minimnya narasi yang berpusat pada korban memperparah stigma dan mengurangi dukungan publik, sementara perlindungan hukum yang tidak konsisten kian memperburuk dampak buruk yang dialami korban. Adapun penelitian [Petter & Giddens \(2023\)](#) yang berjudul "*Is it Your Fault? Framing Social Media Inclusion and Exclusion Using Just World Theory*" menjelaskan bahwa tindakan menyalahkan korban dapat berujung pada pengucilan sosial serta memberikan dampak yang

tidak proporsional terhadap kelompok masyarakat yang memang sudah rentan mengalami pengucilan. Terdapat juga perilaku yang melanggar ketimpangan ras, etnis, gender, dan ekonomi yang sudah ada.

Penelitian yang dilakukan [Wright et al. \(2026\)](#) dengan judul *“Victim Blaming, Gender, and Social Media Commentary: A Randomized Vignette Study of Audience Comments on News Reports of Intimate Partner Homicide”* menjelaskan bahwa hasil analisis terhadap responden menunjukkan adanya efek interaksi antara jenis kelamin pasangan pelaku dengan korban dan bingkai pemberitaan media terhadap komentar responden. Responden cenderung lebih menyalahkan korban ketika korban berjenis kelamin laki-laki (dengan pelaku perempuan) dan terdapat bingkai yang menyalahkan korban. Temuan studi ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan dan praktik. Secara khusus, diperlukan peningkatan pelatihan dan penyediaan sumber daya bagi para profesional media, serta penciptaan komunitas daring yang lebih aman melalui moderasi komentar yang efektif. Sejalan dengan Wright, [Suvarna et al. \(2020\)](#) juga menyatakan bahwa pelaku laki-laki lebih banyak memberikan komentar menyalahkan korban. Adapun menurut [Azzen \(2025\)](#) dalam penelitiannya berjudul *“Objectification of female cosplayers in Indonesian digital communities: A case study of Ai Kirishima”* mengungkapkan bahwa ruang digital mereproduksi wacana patriarkis yang menempatkan perempuan, khususnya *cosplayer*, sebagai objek pasif dalam narasi kekerasan. Melalui komentar yang ditandai dengan sikap menyalahkan korban, objektifikasi, pembelaan terhadap pelaku, serta minimnya empati, dominasi bias gender menjadi nyata, meminggirkan perempuan sekaligus mengaburkan pertanggungjawaban pelaku dalam wacana publik.

Terdapat juga penelitian dari [Nirmalasari & Sarwono \(2021\)](#) tentang *“Symbolic Violence Manifestation Behind Victim Blaming Practices”* yang menyebutkan bahwa manifestasi kekerasan simbolik bekerja melalui bahasa, representasi, dan simbol. Kekerasan simbolik tersebut kemudian menempatkan perempuan ke dalam kelompok yang dibungkam oleh budaya patriarkis. Studi ini mengonfirmasi bahwa praktik menyalahkan korban dapat dilakukan oleh siapa saja, baik individu maupun institusi. Perlu dicatat bahwa institusi yang didukung oleh media massa memiliki pengaruh besar dalam penyebaran informasi. Upaya membuka ruang publik bagi perempuan melalui pidato, diskusi, dan tulisan sangat diperlukan untuk menghentikan praktik menyalahkan korban dan mencapai kesadaran reflektif sebagai *heterodoxa*. Adapun [Agdelia & Kartika \(2025\)](#) dalam penelitiannya *“Gendered oppression and textual power: A critical discourse analysis of online gender-based violence in the RK case on IDNTimes.com”* menjelaskan bahwa penggambaran yang konsisten terhadap RK sebagai korban yang pasif, tidak berdaya, dan patut dicurigai secara moral memperkuat budaya menyalahkan korban sekaligus memicu empati yang terbatas. Konstruksi media tersebut mencerminkan ketimpangan sosial, budaya, dan struktural yang lebih luas dalam cara Indonesia memperlakukan perempuan yang terlibat dalam skandal seksual.

Tindakan penyalahan korban dikemas menggunakan bahasa-bahasa yang sering kali menyudutkan korban. [Firmanda et al. \(2023\)](#) menyatakan bahwa peran realisme hukum dalam mengatasi perilaku *victim blaming* yang dilakukan masyarakat media sosial adalah untuk dapat mengontrol kepribadian manusia dalam memandang sesuatu berdasarkan gerakan sosial untuk tidak menyalahkan korban atas kejahatan yang terjadi terhadap dirinya. Kekuatan sosial akan

menghasilkan hukum yang adil, apalagi diketahui gerakan para pengguna media sosial sangat berpengaruh karena arusnya penyebaran informasi yang cepat, sehingga dengan begitu hukum pun harus dapat mengikuti perkembangan dan mengatasi problematika yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sering dijumpai pada kolom komentar pada konten media sosial sehingga peran bahasa sangatlah vital, baik itu sebagai bukti hukum ataupun sebagai sarana advokasi yang baik untuk pemahaman *victim blaming* pada masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada dua kasus pelecehan seksual di lingkungan umum, yaitu pelecehan di tempat ibadah dan pelecehan di transportasi umum. Pelecehan di tempat ibadah terjadi ketika salah satu pengguna media sosial sedang beribadah ke tanah suci, dan pelecehan di transportasi umum terjadi ketika korban menggunakan transportasi KRL. Kejadian *victim blaming* terdapat pada kolom komentar unggahan media sosial TikTok dengan akun @novigiana dan akun @Tangsel.info. Etika dalam bermedia sosial juga telah dinyatakan oleh Xanderina et al. (2024) yang menyebutkan bahwa kesadaran etika digital tidak hanya mengurangi dampak yang bersifat negatif, melainkan juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bertanggung jawab di dunia maya. Selain itu, penguatan regulasi dan penegakan hukum dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Hal ini memberikan kontrol terhadap interaksi sosial yang mampu mempersempit ruang gerak pelaku perundungan, hoaks, dan pelanggaran privasi digital. Akmal et al. (2026) juga menyatakan persepsi netizen terhadap pelecehan seksual verbal di media sosial dipengaruhi oleh konstruksi sosial mengenai gender. Konstruksi tersebut membentuk standar ganda dalam menilai pengalaman korban. Korban laki-laki sering kali dipersepsikan sebagai pihak yang tidak dirugikan bahkan dianggap memperoleh pengalaman yang menguntungkan dan membuat iri laki-laki lain, sementara korban perempuan lebih sering mendapatkan pembelaan maupun kecenderungan *victim blaming*.

Nuswantara (2019) memberikan hasil analisis menggunakan teori Norman Fairclough pada tagar di media sosial Instagram. Pada penelitiannya terhadap dimensi teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosial, dapat disimpulkan bahwa tagar dalam media sosial Instagram muncul sebagai tren masyarakat dalam merespons berbagai isu dan fenomena yang sedang berkembang. Respons ini dapat berupa sebuah bentuk dukungan, simpati, aksi solidaritas, maupun bentuk perlawanan dari masyarakat. Sejalan dengan Nuswantara, Ayuningrum (2021) juga menyatakan bahwa media sosial Twitter menjadi media yang empuk bagi pelaku pelecehan seksual karena sifatnya yang bebas, anonim dan luas berdasarkan model penelitian Fairclough. Musdolifah et al. (2025) menyatakan bahwa komentar-komentar negatif di media sosial sering kali berisi pandangan yang menyalahkan dan mempermalukan wanita yang memilih untuk tidak memiliki anak. Komentar-komentar ini tidak hanya memengaruhi persepsi masyarakat terhadap wanita *childfree*, tetapi juga memperkuat stigma sosial yang menimbulkan pertanyaan mengenai kesejahteraan psikologis dan emosional mereka. Representasi wanita karier di media sosial Instagram tidak hanya menciptakan citra positif, tetapi juga memiliki implikasi terhadap pandangan masyarakat terhadap peran wanita dalam lingkup profesional (Kusuma et al., 2024).

Penelitian ini mengkaji penggunaan diksi pada kolom komentar media sosial dengan indikasi penyalahan terhadap korban pelecehan. Menurut Fairclough (1996), penggunaan

bahasa dapat berperan dalam mengubah hubungan sosial. Wacana yang terus diulangi dalam lingkup masyarakat akan mengakibatkan wacana tersebut “tampak normal”. Penggunaan bahasa pada media sosial memengaruhi identitas sosial yang dibentuk melalui interaksi di media sosial menunjukkan bahwa bahasa adalah alat penting dalam membangun komunitas dan solidaritas (Hazimah et al., 2024). Bahkan, suatu ideologi atau kepercayaan bersama yang personal atau pribadi dapat mengelaborasi dan membentuk wacana kolektif (Sari & Yusriansya, 2020). Wujud bahasa dalam wacana yang dilabeli dengan makna negatif memberikan pandangan bahwa korban turut andil dalam kekerasan yang menimpanya sehingga mengakibatkan korban mengalami reviktimisasi. Penyalahan korban juga sering muncul dalam sikap penutur yang diwujudkan dalam kalimat. Sikap penutur mencerminkan pandangan pada orang tersebut untuk memberikan modalitas pada kalimat yang memberikan sikap penutur bahwa apa yang diutarakan oleh penutur adalah benar. Adapun modalitas menurut Alwi (1992) dibagi menjadi empat aspek, yaitu modalitas intensional, modalitas epistemik, modalitas deontik, dan modalitas dinamik. Kalimat-kalimat pada kolom komentar dianalisis dengan model Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dan modalitas Hasan Alwi guna menemukan kata, frasa, serta klausa yang mengindikasikan penyalahan terhadap korban pelecehan. Dengan demikian, masalah penelitian ini adalah bagaimana aspek kebahasaan yang digunakan oleh pelaku *victim blaming* dalam komentar media sosial TikTok.

METODE

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Mengacu ke pendapat Mahsun (2017), penelitian kualitatif adalah penelitian yang berorientasi pada pemaknaan dan deskripsi fenomena, khususnya fenomena kebahasaan. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Analisis Wacana Kritis dari Norman Fairclough. Sumber data penelitian ini adalah akun TikTok @novigiana dan @Tangsel.info, dengan objek penelitiannya adalah komentar-komentar pada akun TikTok @novigiana dan @Tangsel.info yang terindikasi mengandung *victim blaming*.

Data satuan-satuan bahasa pada kolom komentar dianalisis untuk menemukan pola kebahasaan dalam tindakan penyalahan pada korban pelecehan. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah 10 sampel komentar warganet pada unggahan media sosial TikTok pada akun TikTok @julynonov dan @tangsel.info mengenai dua kasus pelecehan seksual, yaitu kasus pelecehan terhadap jamaah perempuan di tanah suci dan kasus pelecehan verbal oleh petugas KRL terhadap penumpang perempuan. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi digital dan dianalisis menggunakan dimensi analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosial Fairclough, serta didukung analisis modalitas menurut Hasan Alwi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

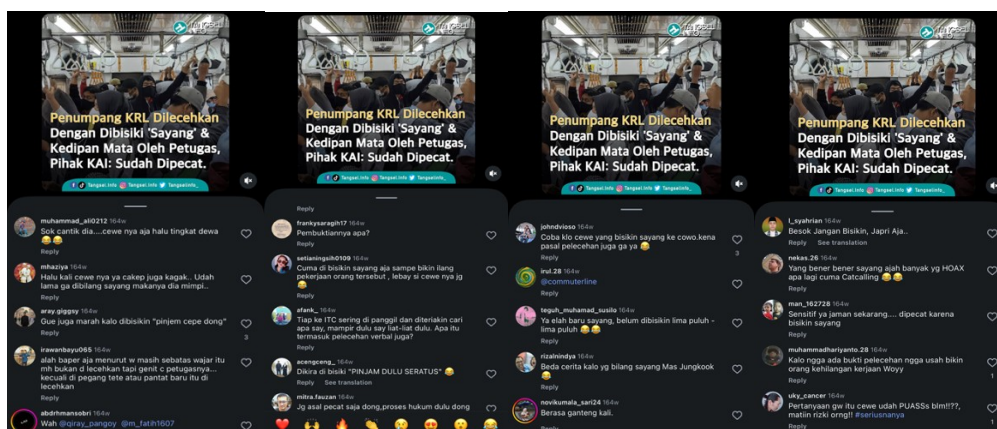
Victim blaming ditemukan pada kolom komentar terkait unggahan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh pengguna TikTok akun @julynonov. Pelecehan tersebut terjadi saat dirinya sedang beribadah di tanah suci Mekah. Ia mengalami pelecehan seksual dengan pelaku

yang memegang area atau bagian sensitifnya. Di sisi lain, lewat unggahan akun tersebut, komentar yang menyalahkan sebagai korban menjadi salah satu yang disorot. Beberapa komentar di akun tersebut antara lain sebagaimana **Gambar 1** berikut.



Gambar 1. Data komentar pada unggahan TikTok @julynonov

Hal serupa juga ditemukan pada kolom komentar akun @tangsel.info saat mengunggah postingan terkait pelecehan seksual di transportasi umum, yakni KRL. Beberapa komentar di kolom postingan tersebut dapat dilihat sebagaimana **Gambar 2** berikut.



Gambar 2. Data komentar pada unggahan TikTok @tangsel.info

Selanjutnya, data-data komentar tersebut dapat diekstraksi menjadi data-data penelitian sebagaimana **Tabel 1** berikut.

Tabel 1. Data *victim blaming* pada kolom komentar TikTok @julynonov

Nama Akun	Komentar	Nomor Data
Skyline	<i>kenapa mesti post gambar menangis wanita lemah</i>	VB-01
Gunakan akal sehatmu	<i>ya resiko kesana...namanya aj ibadah disitu ujiannya mknny hrus siap mental dn amunisi</i>	VB-02
cici_kaka	<i>coba instropeksi diri juga, kadang kadang apa yg kita rasa di sana, mmang balasan/pengingat/jdi pembelajaran untuk kita</i>	VB-03
beno	<i>apa yg kau tanam, semuanya akan terjadi dirumah suci ini</i>	VB-04
situkang komen	<i>lahh kocak lu makanya kesana sama mahrom</i>	VB-05
muhammad ali0212	<i>sok cantik dia....cewe nya aja halu tingkat dewa</i>	VB-06

Nama Akun	Komentar	Nomor Data
irawanbayu065	<i>alah baper aja menurut w masih sebatas wajar itu mh bukan d lecehkan tapi genit c petugasnya... kecuali di pegang tete atau pantat baru itu di lecehkan</i>	VB-07
rizalnindya	<i>beda cerita kalo yg bilang sayang Mas Jungkook</i>	VB-08
i_syahrian	<i>besok jangan bisikin, japri aja</i>	VB-09
nekas.26	<i>yang bener bener sayang ajah banyak yg HOAX apa lagi cuma catcalling</i>	VB-10

Pembahasan

Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teori Analisis Wacana Kritis dari Fairclough untuk menemukan temuan-temuan penelitian. Berikut adalah pembahasan terhadap data-data penelitian.

Data VB-01

“kenapa mesti post gambar menangis wanita lemah”

Komentar di atas tidak memusatkan perhatian pada pengalaman pelecehan yang dialami korban, melainkan pada cara korban mengekspresikan emosinya melalui unggahan foto sedang menangis. Klausa *“kenapa mesti post gambar menangis”* merepresentasikan tindakan korban mengunggah foto sebagai sesuatu yang tidak perlu atau tidak pantas dilakukan. Sementara itu, frasa *“wanita lemah”* membangun representasi bahwa perempuan yang menunjukkan kesedihan dipandang sebagai pribadi yang lemah, tidak tangguh, dan tidak mampu menghadapi masalah. Akibatnya, korban tidak lagi diposisikan sebagai individu yang membutuhkan empati atas pengalaman kekerasan yang dialaminya, tetapi sebagai perempuan yang dianggap gagal memenuhi ekspektasi sosial mengenai ketangguhan.

Frasa *“wanita lemah”* merupakan bentuk penilaian langsung terhadap karakter korban. Kata *lemah* berfungsi sebagai adjektiva evaluatif yang memberi label negatif kepada korban. Penilaian tersebut tidak berkaitan dengan fakta terjadinya pelecehan, melainkan dengan respons emosional terhadap korban setelah mengalami peristiwa tersebut. Frasa *“wanita lemah”* mereproduksi ideologi mengenai ekspektasi gender, yaitu bahwa perempuan seharusnya tetap kuat, tidak menunjukkan kesedihan secara terbuka, dan mengendalikan emosinya meskipun menjadi korban kekerasan. Selain itu, penggunaan label *“wanita lemah”* berpotensi memperkuat stereotip gender yang menilai ekspresi emosi perempuan sebagai tanda kelemahan. Ketika wacana seperti ini terus diulang, masyarakat dapat menganggap bahwa korban yang menunjukkan trauma tidak layak memperoleh simpati, sehingga praktik *victim blaming* semakin dinormalisasi.

Data VB-01

“ya resiko kesana...namanya aj ibadah disitu ujiannya mkny hrus siap mental dn amunisi”

Data komentar tersebut merepresentasikan pelecehan seksual sebagai bagian dari risiko yang melekat pada pelaksanaan ibadah di tanah suci. Representasi ini tampak melalui klausa “*ya resiko ke sana*”, yang mengonstruksi peristiwa pelecehan sebagai konsekuensi yang wajar ketika seseorang pergi ke lokasi tersebut. Pilihan kata *resiko* menggeser fokus dari tindakan pelaku kepada situasi yang dihadapi korban. Akibatnya, pelecehan tidak lagi dipandang sebagai tindakan kriminal yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku, melainkan sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh korban ketika memilih melakukan perjalanan ibadah. Selain itu, klausa “*namanya aj ibadah disitu ujiannya*” merepresentasikan pelecehan sebagai bagian dari ujian dalam beribadah. Representasi ini memberikan makna religius terhadap tindakan pelaku sehingga pelecehan diposisikan sebagai sesuatu yang harus diterima, bukan sebagai pelanggaran.

Klausa “*harus siap mental dan amunisi*” mengandung modalitas deontik. Menurut Alwi (1992), kata *harus* menyatakan kewajiban atau keharusan. Dalam konteks ini, modalitas tersebut membangun norma bahwa setiap orang yang beribadah ke tanah suci Mekah wajib mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan pelecehan. Dari perspektif Fairclough, modalitas tersebut menunjukkan posisi penutur sebagai pihak yang menetapkan norma perilaku. Penutur seolah memiliki otoritas untuk menentukan bagaimana korban seharusnya bersikap ketika menghadapi potensi kekerasan. Dalam kerangka Fairclough, wacana ini mereproduksi ideologi yang menormalisasi kekerasan sebagai konsekuensi situasional sekaligus mempertahankan relasi kuasa yang membebankan tanggung jawab pencegahan kepada korban, bukan kepada pelaku.

Data VB-03

“coba instropeksi diri juga, kadang kadang apa yg kita rasa di sana, mmang balasan/pengingat/jdi pembelajaran untuk kita”

Data komentar tersebut menggambarkan pengalaman pelecehan seksual bukan sebagai akibat tindakan pelaku, melainkan sebagai balasan, pengingat, atau pembelajaran bagi korban. Representasi ini tampak pada klausa “*apa yang kita rasa di sana memang balasan/pengingat/jadi pembelajaran untuk kita*”. Penggunaan kata balasan mengonstruksi peristiwa sebagai konsekuensi atas tindakan korban sebelumnya, sedangkan kata pengingat dan pembelajaran menggeser makna pelecehan menjadi pengalaman yang memiliki fungsi mendidik bagi korban.

Akibatnya, fokus wacana berpindah dari pelaku yang melakukan pelecehan kepada korban yang dianggap perlu mengambil hikmah atau pelajaran dari peristiwa tersebut. Dalam perspektif Fairclough, representasi semacam ini merupakan bentuk konstruksi realitas melalui bahasa, karena cara suatu peristiwa direpresentasikan akan memengaruhi cara masyarakat memahami penyebab dan pihak yang bertanggung jawab. Meskipun tidak terdapat kata yang secara langsung menyatakan bahwa korban bersalah, ujaran “*coba introspeksi diri juga*” mengandung penilaian bahwa korban memiliki sesuatu yang perlu diperiksa atau diperbaiki dalam dirinya. Evaluasi ini mengisyaratkan bahwa korban tidak sepenuhnya berada pada posisi yang benar sehingga perlu melakukan refleksi diri. Klausa “*coba introspeksi diri juga*”

mengandung modalitas deontik yang bersifat lunak. Menurut Alwi (1992), modalitas deontik berkaitan dengan kewajiban, keharusan, atau anjuran. Kata *coba* memang terdengar seperti saran, tetapi dalam konteks ini berfungsi sebagai bentuk anjuran normatif yang mengarahkan korban untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Anjuran tersebut mengandung makna bahwa introspeksi merupakan respons yang seharusnya dilakukan korban setelah mengalami pelecehan.

Data VB-04

“apa yg kau tanam, semuanya akan terjadi dirumah suci ini”

Data komentar tersebut menggambarkan pelecehan seksual sebagai akibat dari perbuatan korban di masa lalu, bukan sebagai tindakan yang sepenuhnya dilakukan oleh pelaku. Representasi ini dibangun melalui ungkapan *“apa yang kau tanam”* yang merupakan metafora dari prinsip sebab-akibat. Dalam konteks komentar terhadap korban pelecehan seksual, metafora tersebut mengonstruksi bahwa pengalaman yang dialami korban merupakan hasil dari tindakan atau kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Dengan representasi seperti ini, fokus pembahasan bergeser dari tindakan pelaku kepada riwayat moral korban. Korban diposisikan sebagai pihak yang ikut menentukan terjadinya peristiwa, sedangkan pelaku tidak lagi menjadi pusat perhatian. Meskipun tidak terdapat kata-kata, seperti *bersalah*, *ceroboh*, atau *lalai*, ungkapan *“apa yang kau tanam”* mengandung penilaian bahwa korban pernah melakukan sesuatu yang buruk sehingga pengalaman pelecehan dipandang sebagai konsekuensi yang pantas diterima.

Data ujaran tersebut tidak menggunakan penanda modal, seperti *harus*, *mungkin*, atau *boleh*, tetapi mengandung modalitas epistemik dengan tingkat kepastian yang tinggi melalui klausa *“semuanya akan terjadi”*. Menurut Alwi (1992), modalitas epistemik menunjukkan tingkat keyakinan penutur terhadap suatu proposisi. Penggunaan kata *akan* dalam konteks ini menyatakan keyakinan bahwa apa yang dilakukan seseorang pada masa lalu pasti akan berbuah dalam bentuk pengalaman yang dialaminya di rumah suci.

Data VB-05

“lahh kocak lu makanya kesana sama mahrom”

Pada data komentar tersebut, terdapat nasihat bahwa sebaiknya ketika melakukan ibadah ke tanah suci maka sebaiknya bersama mahram. Akan tetapi, pada kalimat tersebut memberikan asumsi lain bahwa korbanlah yang bersalah karena melakukan ibadah ke tanah suci tidak bersama mahram sehingga pelecehan wajar terjadi. Penggunaan frasa *“lahh kocak lu”* merupakan bentuk evaluasi negatif terhadap korban. Diksi *kocak* tidak digunakan untuk menyampaikan humor, melainkan sebagai bentuk sindiran yang merendahkan keputusan korban. Evaluasi tersebut membangun citra bahwa korban telah bertindak bodoh atau tidak bijaksana sehingga dianggap pantas menerima konsekuensi dari perbuatannya.

Penggunaan kata “*makanya*” berfungsi sebagai penanda hubungan sebab-akibat. Kata ini menyiratkan bahwa pelecehan yang dialami korban merupakan akibat logis dari keputusan korban berangkat tanpa mahram. Dengan demikian, fokus wacana bergeser dari tindakan pelaku menuju perilaku korban. Dalam perspektif Fairclough, pilihan leksikal seperti ini tidak bersifat netral karena berkontribusi membentuk representasi tertentu terhadap suatu peristiwa. Ujaran tersebut mengandung modalitas deontik yang diwujudkan secara implisit melalui bentuk nasihat “*kesana sama mahrom*”. Walaupun tidak menggunakan penanda, seperti *harus* atau *seharusnya*, ujaran tersebut mengandung makna normatif bahwa perempuan diwajibkan bepergian dengan mahram. Modalitas ini membangun norma perilaku yang kemudian dijadikan dasar untuk menilai korban.

Data ujaran tersebut mengandung presuposisi bahwa perempuan yang pergi ke tanah suci tanpa mahram telah melakukan kesalahan. Asumsi tersebut diterima sebagai dasar tuturan tanpa pernah dipertanyakan apakah keberadaan mahram memiliki hubungan kausal dengan tindakan pelecehan yang dilakukan pelaku. Presuposisi ini menggeser penyebab utama pelecehan dari tindakan pelaku kepada keputusan korban. Penggunaan pronomina “*lu*” menunjukkan gaya tutur informal yang menempatkan korban sebagai objek penilaian secara langsung. Pemilihan pronomina ini juga memperlihatkan adanya relasi yang tidak setara karena penutur mengambil posisi sebagai pihak yang berhak menghakimi dan memberikan penilaian terhadap perilaku korban.

Pada tingkat praktik sosial, komentar tersebut mereproduksi ideologi yang memandang bahwa perempuan memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga diri dari kekerasan seksual. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui tuntutan agar perempuan bepergian bersama mahram. Akibatnya, penyebab utama pelecehan bergeser dari tindakan pelaku menuju kepatuhan korban terhadap norma sosial atau norma keagamaan. Secara keseluruhan, struktur bahasa pada komentar tersebut merepresentasikan korban sebagai individu yang lalai terhadap norma, sedangkan tindakan pelaku tidak menjadi pusat perhatian.

Data VB-06

“Sok cantik dia.... cewe nya aja halu tingkat dewa”

Frasa “*sok cantik*” pada data komentar tersebut membangun representasi bahwa korban merasa dirinya sangat menarik sehingga menganggap setiap tindakan laki-laki sebagai bentuk ketertarikan seksual. Sementara itu, klausa “*cewenya aja halu tingkat dewa*” merepresentasikan korban sebagai orang yang berimajinasi atau mengada-ada mengenai peristiwa yang dialaminya. Akibatnya, fokus pembaca tidak lagi tertuju pada tindakan petugas KRL yang diduga melakukan pelecehan verbal, melainkan pada karakter dan kredibilitas korban. Dalam perspektif Fairclough, representasi ini merupakan strategi linguistik yang mengonstruksi realitas sosial dengan mengubah posisi korban menjadi pihak yang patut diragukan.

Dalam ruang media sosial, komentar seperti ini mudah menyebar karena menggunakan bahasa yang singkat, emosional, dan populer (*sok cantik, halu*). Jika mendapat dukungan dari pengguna lain, komentar tersebut dapat membentuk pola diskusi yang lebih berfokus pada

kredibilitas korban daripada perilaku pelaku. Selain itu, pelaku pelecehan menjadi tidak terlihat dalam wacana. Pembahasan tidak lagi berfokus pada tindakan petugas yang membisikkan kata “sayang” kepada penumpang, tetapi bergeser menjadi penilaian terhadap karakter korban. Pergeseran fokus ini merupakan salah satu ciri utama *victim blaming* karena akuntabilitas pelaku berkurang sementara korban justru menjadi sasaran penilaian.

Data VB-06

“Alah baper aja menurut w masih sebatas wajar itu mh bukan d lecehkan tapi genit c petugasnya... kecuali di pegang tete atau pantat baru itu di lecehkan”

Frasa “*baper aja*” merepresentasikan reaksi korban sebagai sesuatu yang berlebihan, sedangkan frasa “*masih sebatas wajar*” membangun representasi bahwa perilaku petugas KRL merupakan tindakan yang normal dan dapat diterima dalam interaksi sehari-hari. Selanjutnya, klausa “*bukan d lecehkan tapi genit c petugasnya*” mengubah identitas tindakan pelaku. Perilaku petugas yang dipandang oleh korban dipersepsikan sebagai pelecehan verbal tetapi direpresentasikan hanya sebagai sikap genit. Dengan demikian, pelaku tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang melakukan pelanggaran, melainkan sebagai individu yang sekadar menunjukkan perilaku menggoda. Frasa “*menurut w*” merupakan modalitas epistemik yang menunjukkan bahwa penutur menyatakan pendapat pribadi. Namun, meskipun diawali dengan penanda subjektivitas, penutur kemudian menyampaikan pernyataan dengan tingkat keyakinan yang tinggi. Adapun frasa “*masih sebatas wajar*” menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penilaian bahwa tindakan pelaku tidak termasuk pelecehan.

Selain itu, penggunaan kata “*baru*” pada klausa “*kecuali dipegang tete atau pantat baru itu dilecehkan*” membentuk batas normatif mengenai definisi pelecehan seksual. Penutur menetapkan bahwa pelecehan baru dianggap terjadi apabila terdapat kontak fisik terhadap bagian tubuh tertentu. Komentar tersebut mereproduksi ideologi yang mempersempit definisi pelecehan seksual hanya pada tindakan fisik. Akibatnya, bentuk-bentuk pelecehan verbal, seperti membisikkan kata-kata bernuansa seksual atau romantis tanpa persetujuan, dianggap bukan sebagai kekerasan. Ujaran tersebut menunjukkan adanya sikap penutur dalam berkomentar. Penutur mengasumsikan bahwa korban terlalu membawa perasaan dan berhalusinasi jika korban cantik. Sikap penutur seperti demikian menunjukkan korban tidak seharusnya menganggap hal tersebut sebagai pelecehan dan bersikap wajar atas kejadian yang menimpanya. Data ujaran tersebut mengandung modalitas epistemik, yaitu menyatakan tingkat keyakinan penutur terhadap kebenaran suatu peristiwa.

Data VB-08

“Beda cerita kalo yg bilang sayang Mas Jungkook”

Pada data komentar tersebut, terdapat intertekstualitas budaya populer dengan menyebut Jungkook (anggota *boyband* BTS) sebagai representasi laki-laki yang dianggap sangat menarik secara fisik. Frasa “*beda cerita*” merupakan frasa yang menunjukkan adanya kondisi yang

dianggap akan menghasilkan respons berbeda. Frasa “*Mas Jungkook*” digunakan sebagai simbol laki-laki berparas menarik dan memiliki status selebritas. Penggunaan kata sapaan “*Mas*” memberi nuansa akrab dan memperhalus penyebutan tokoh tersebut. Meskipun singkat, komentar ini mengandung beberapa praanggapan. Pelecehan dianggap bergantung pada siapa pelakunya. Jika pelaku adalah laki-laki yang menarik secara fisik, tindakan membisikkan kata “sayang” tidak akan dianggap sebagai pelecehan. Korban diasumsikan akan menerima atau bahkan menikmati tindakan tersebut apabila dilakukan oleh orang yang tampan.

Data VB-09

“Besok jangan bisikin, japri aja”

Penggunaan diksi “*besok*” pada data komentar tersebut mengandaikan bahwa tindakan serupa akan kembali terjadi di masa depan. Kemudian, frasa “*jangan bisikin*” merujuk langsung pada tindakan petugas yang membisikkan kata “sayang” kepada korban dan “*japri aja*”, alias jalur pribadi atau juga pesan pribadi, merupakan istilah yang lazim digunakan di media sosial untuk menyarankan komunikasi dilakukan melalui pesan langsung. Kalimat berbentuk imperatif (perintah), seolah-olah penulis sedang memberikan saran kepada pelaku. Namun, saran tersebut bukan berupa larangan melakukan pelecehan, melainkan menyarankan mengubah cara melakukannya, yaitu dari membisikkan secara langsung menjadi menghubungi korban melalui pesan pribadi. Data ujaran tersebut mengandung beberapa praanggapan. Pertama, persoalan utama bukan tindakan pelecehan, tetapi cara pelaku menyampaikannya. Apabila dilakukan melalui media lain (percakapan teks pribadi), tindakan tersebut dianggap lebih dapat diterima. Kedua, pengalaman korban diperlakukan sebagai bahan candaan, bukan sebagai peristiwa yang perlu ditanggapi secara serius.

Data VB-10

“Yang bener bener sayang ajah banyak yg HOAX apa lagi cuma catcalling”

Data komentar tersebut mereproduksi wacana skeptisisme terhadap pengakuan korban yang sering ditemukan dalam diskusi media sosial mengenai kekerasan seksual. Penggunaan istilah “*hoax*” yang awalnya banyak digunakan dalam konteks informasi palsu, dipindahkan ke konteks pengalaman korban pelecehan. Perpindahan makna ini membentuk wacana bahwa laporan korban layak diperlakukan seperti berita palsu yang harus dicurigai terlebih dahulu.

Selain itu, penggunaan frasa “*cuma catcalling*” menunjukkan bagaimana media sosial sering membangun hierarki kekerasan seksual, yakni pelecehan verbal dianggap tidak cukup serius untuk dipermasalahkan. Ketika komentar semacam ini memperoleh dukungan dari pengguna lain, wacana yang meremehkan *catcalling* dan meragukan korban semakin direproduksi sebagai pandangan yang dianggap masuk akal. Dengan demikian, fokus tidak lagi diarahkan pada tindakan petugas KRL yang membisikkan kata “sayang” kepada penumpang tanpa persetujuan, melainkan pada daya tarik fisik pelaku.

Victim blaming pada pelecehan seksual masih menjadi fenomena yang dipengaruhi oleh budaya patriarki, seksisme, dan kurangnya edukasi bentuk-bentuk pelecehan. Azizah et al. (2025) berpandangan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam masyarakat terhadap *victim blaming*. Meskipun sering menjadi media menyalahkan korban, tetapi juga mampu menjadi media advokasi untuk melawan *victim blaming*. Suvarna et al., (2020) menyatakan bahwa opini masyarakat di media sosial berubah berdasarkan gender. Dapat diamati bahwa perbedaan gender pada pelaku *victim blaming* memengaruhi reaksi negatif yang mereka terima di media sosial. Pelaku bergender perempuan diperlakukan lebih buruk dibandingkan pelaku laki-laki.

Selain itu, gender korban juga memengaruhi tingkat dukungan yang diterima, di mana korban perempuan menerima dukungan lebih besar dibandingkan korban laki-laki. Terakhir, gender penulis komentar juga berperan dalam tindakan menyalahkan korban. Laki-laki terlihat lebih sering melakukan tindakan menyalahkan korban dibandingkan perempuan. Berdasarkan data yang ditampilkan pada bagian sebelumnya, dapat dilihat bahwa penulis komentar dalam menyalahkan korban sebagian besar merupakan laki-laki jika dilihat pada penggunaan nama pada akun tersebut. Pada tabel data, terlihat bahwa terdapat enam laki-laki dan empat akun anonim yang menulis komentar dengan indikasi kalimat menyalahkan dan menghina korban. Hal ini dapat diketahui bahwa gender laki-laki lebih sering melakukan penyalahan korban sehingga budaya patriarki kental dalam penyalahan korban yang memosisikan perempuanlah yang bersalah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *victim blaming* dalam komentar media sosial tidak selalu diwujudkan melalui bentuk penyalahan yang eksplisit, tetapi juga melalui strategi kebahasaan yang bersifat implisit. Berdasarkan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, penyalahan korban dibangun melalui representasi yang menggeser tanggung jawab dari pelaku kepada korban, penggunaan evaluasi negatif terhadap karakter korban, modalitas yang menampilkan kewajiban atau keyakinan penutur mengenai perilaku yang dianggap benar, serta presuposisi yang menganggap korban turut berkontribusi terhadap terjadinya pelecehan seksual. Pilihan aspek leksikal seperti *sok, harus, alah, makanya, lemah, halu, baper, resiko, balasan, ujian, dan mahrom* tidak hanya berfungsi sebagai unsur linguistik, tetapi juga mereproduksi ideologi yang menormalisasi penyalahan korban.

Pada tataran praktik sosial, komentar-komentar tersebut memperlihatkan bahwa bahasa menjadi sarana reproduksi relasi kuasa yang menguntungkan pelaku dan melemahkan posisi korban. Korban direpresentasikan sebagai individu yang emosional, kurang berhati-hati, atau memiliki kesalahan moral, sedangkan tindakan pelaku dipandang sebagai sesuatu yang wajar, sekadar genit, atau bagian dari risiko situasional. Akibatnya, perhatian publik bergeser dari pertanggungjawaban pelaku menuju penilaian terhadap perilaku korban.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa bahasa dalam media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai praktik sosial yang membentuk cara masyarakat memahami kekerasan seksual. Temuan ini memperkuat pandangan Fairclough

bahwa bahasa merupakan medium reproduksi ideologi dan relasi kuasa. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan kesadaran berbahasa menjadi penting agar ruang media sosial tidak terus mereproduksi praktik *victim blaming* terhadap korban pelecehan seksual. Adapun untuk saran penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jenis media sosial sebagai sumber penelitiannya. Perbandingan data dan temuan pada berbagai jenis media sosial akan memperkuat hasil penelitian terkait dengan pelabelan kebahasaan sebagai praktik *victim blaming* di media sosial.

- Kontribusi Penulis** : Felix Brian Hari Ekaristanto merancang penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menyusun dan merevisi naskah artikel. Fitri Alfariyis memberikan arahan selama proses penelitian, memberikan masukan terhadap analisis dan pembahasan, serta melakukan telaah kritis terhadap naskah artikel. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir naskah.
- Pernyataan Pendanaan** : Penelitian ini tidak menerima pendanaan apa pun.
- Konflik Kepentingan** : Kedua penulis menyatakan bahwa mereka tidak memiliki konflik kepentingan.
- Persetujuan Etika** : Penelitian ini tidak memerlukan persetujuan etik karena menggunakan dokumen putusan pengadilan yang tersedia untuk publik sebagai sumber data dan tidak melibatkan subjek manusia secara langsung.

REFERENSI

- Agdelia, S. P., & Kartika, A. (2025). Gendered oppression and textual power: A critical discourse analysis of online gender-based violence in the RK case on IDNTimes.com. *Digital Theory, Culture & Society*, 3(2), 70–75. <https://doi.org/10.61126/dtcs.v3i2.117>
- Akmal, R., Putra, A. W., & Indriyany, I. A. (2026). Dinamika Pelecehan Seksual Verbal di Media Sosial: Analisis Standar Ganda pada Kekerasan Gender Berbasis Online. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 5(5). <https://doi.org/10.56799/jim.v5i5.16205>
- Alfi, I., & Halwati, U. (2019). Faktor-faktor Blaming the Victim (Menyalahkan Korban) di Wilayah Praktik Kerja Sosial. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1(2), 217–228. <https://doi.org/10.18326/imej.v1i2.217-228>
- Alwi, H. (1992). *Modalitas dalam Bahasa Indonesia* (First). Kanisius Yogyakarta.
- Ayuningrum, N. G. (2021). Analisis Wacana Kritis Komentar Seksual dalam Media Sosial Twitter Laki-Laki Berekspresi Gender Feminin. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(2), 121–130. <https://doi.org/10.22146/jwk.3620>
- Azizah, S. N., Alia, M. N., & Mujayapura, M. R. R. (2025). Fenomena Victim Blaming dalam Kasus Pelecehan: Kebiasaan Buruk yang Terus Dinormalisasi. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2361–2368. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2361-2368>
- Azzen, S. K. (2025). Objectification of female cosplayers in Indonesian digital communities: A case study of Ai Kirishima. *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 18(1), 45–58. <https://doi.org/10.35719/annisa.v18i1.310>

- Fairclough, N. (1996). *Language and Power*. Longman Inc.
- Firmanda, H., Azlina, I. I. S., & Septipah, I. (2023). Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Victim Blaming di Media Sosial Berdasarkan Aliran Realisme Hukum. *Reformasi Hukum*, 27(1), 32–41. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.489>
- Hazimah, A., Reviel, D., Aprilia, L., Dea, I. M., & Lubis, M. (2024). *Analisis Wacana pada Media Sosial: Studi Kasus Penggunaan Bahasa pada Media Sosial X (Twitter)*. 1(4). <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Isnaini, I., Nasyiriyah, T. N., Istighfari Aulia, N., & Rohmah, S. (2025). The Role of Digital Literacy in social media. *MIMESIS*, 6(1), 58–74. <https://doi.org/10.12928/mms.v6i1.12242>
- Kusuma, A., Al Barqi, M. F., Faisal, A., & Ulum, B. (2024). Analisis Wacana Kritis dalam Media Sosial Instagram tentang “Wanita Karir” Model Analisis Norman Fairclough. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 5(2). <https://doi.org/10.47453/Adhi>
- Mahsun. (2017). *Metode Penelitian Bahasa* (9th ed.). Rajawali Pers. www.rajagrafindo.co.id
- Musdolifah, A., Azzahra, F., Hasanah, M. M., Budiono, N. H., Yusuf, S., & Darmawan, I. (2025). Analisis Wacana Kritis terhadap Komentar Negatif Terkait Childfree di Media Sosial dengan Perspektif Sara Mills. *JURNAL BASTRA*, 10(2), 2025. <https://doi.org/10.36709/bastra>
- Muttaqin, M. Z., & Sriyono, S. (2021). Konstruksi Opini Publik melalui Media Sosial: Studi Pendekatan Analisis Wacana Kritis Grup Facebook Lintas Kejadian Kota Jayapura pada Bulan Juni 2021. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 1(2), 113–129. <https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.113-129>
- Nirmalasari, A., & Sarwono, B. (2021). Symbolic Violence Manifestation Behind Victim Blaming Practices. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 26–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.210531.004>
- Nurhaliza, U., S., & Astuti, K. (2025). *The Impact of Victim Blaming on social media and Handling Efforts for Victims of Sexual Violence Citation*. 05(04), 1623–1634. <https://doi.org/https://doi.org/10.54518/rh.5.4.2025.758>
- Nuswantara, N. G. (2019). Visualisasi Tagar dalam Media Sosial Instagram (Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough). *Jurnal Dekave*, 12(2), 21–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.24821/dkv.v12i2.3521>
- Petter, S., & Giddens, L. (2023). Is it Your Fault? Framing Social Media Inclusion and Exclusion Using Just World Theory. *Journal of the Association for Information Systems*, 24(5), 1248–1270. <https://doi.org/10.17705/1jais.00813>
- Saputra, R., & Gusnita, C. (2021). Victim Blaming Korban Pelecehan Seksual secara Verbal di Media Sosial Instagram. *Jurnal Anomie*, 3(2), 99–111. <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/anomie/article/view/503>
- Sari, N. A., & Yusriansya, E. (2020). Analisis Wacana Kritis Terhadap Konten Media Sosial “Bekal Buat Suami” dalam Perspektif Gender. *Seminar Nasional Linguistik Dadn Sastra*, 68–80. <https://jurnal.uns.ac.id/prosidingsemantiks>

- Suvarna, A., Bhalla, G., Kumar, S., & Bhardwaj, A. (2020). Identifying Victim Blaming Language in Discussions about Sexual Assaults on Twitter. *ACM International Conference Proceeding Series*, 156–163. <https://doi.org/10.1145/3400806.3400825>
- Wright, E., Eriksson, L., & Bond, C. E. W. (2026). Victim Blaming, Gender, and Social Media Commentary: A Randomized Vignette Study of Audience Comments on News Reports of Intimate Partner Homicide. *Journal of Interpersonal Violence*, 41(9–10), 1836–1863. <https://doi.org/10.1177/08862605251322816>
- Xanderina, M., Putri, M. R. K., & Parhusip, J. (2024). Peran Etika Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Teknologi Informasi Pada Media Sosial. *Informatech: Jurnal Ilmiah Informatika Dan Komputer*, 1(2), 211–217. <https://doi.org/https://doi.org/10.69533/4hchfz57>